

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Reformasi telah merubah berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah dengan adanya otonomi daerah dan pengelolaan keuangan negara yang terdesentralisasi. Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri dengan berpedoman pada kaidah otonomi daerah yang berlaku. Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik, dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan selalu tanggap dengan lingkungannya dengan memberikan pelayanan publik yang terbaik secara berkualitas dan transparan. Dalam aspek akuntabilitas, program-program pemerintah harus berorientasi pada hasil, manfaat atau *output* dan *outcome* program-program tersebut. Tidak hanya membelanjakan anggaran lalu dilaporkan dengan baik tetapi dampak positifnya tidak ada.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. mewajibkan setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan sasaran strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Media yang digunakan untuk pelaporan akuntabilitas tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan hasil dari suatu proses Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah untuk menjawab kewajiban tersebut yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan Pemanfaatan informasi kinerja (M.Amar, 2012). Pemerintah dalam menyusun suatu rencana strategi juga harus memperhatikan dasar hukum dan peraturan yang berlaku. Banyak sekali kasus penyelewengan LAKIP yang tidak sesuai dengan hukum bahkan ada juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak melaporkan LAKIP.

AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Dina, 2015). Akhir-akhir ini akuntabilitas kinerja pemerintah sering disoroti karena akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terlihat tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Masih banyak ditemukan beberapa Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah yang mana dalam penyelenggaraan pemerintahannya masih belum sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian tersebut salah satunya dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan melalui akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mana masih belum baik dan hasil rivi u penilaian yang tidak ditindaklanjuti.

Implementasi sistem pengukuran kinerja diharapkan mampu membantu pemerintah dalam memujudkan tujuan dan sasaran, efisiensi, dan efektivitas layanan publik secara transparan, membantu alokasi sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik. Akan tetapi, untuk memperbaiki kinerja tidak cukup dengan mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja saja, melainkan juga adanya partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat sebagai sasaran informasi kinerja yang dihasilkan dari sistem pengukuran kinerja yang diterapkan (Ohorella, 2013). Apriliana (2019:116) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, diantaranya adalah sistem pengendalian intern , pemanfaatan teknologi informasi dan sumber daya manusia yang kompeten. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan (Nasir, dkk, 2017). Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini akan tercapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.

Sistem pengendalian intern dibutuhkan untuk memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan asset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Ramon, 2014). Unsur-unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh (Iqbal, dkk 2017) berjudul “Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” hasil penelitian menunjukkan variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No.56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah. Teknologi Informasi harus dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan sebuah akses dengan biaya yang terjangkau, dan tanggap terhadap kebutuhan yang di perlukan. Pada dasarnya Teknologi Informasi tersebut berguna untuk mempercepat pembangunan nasional menjadi lebih demokratis, berkelanjutan (*sustainable*), dan memfasilitasi tercapainya masyarakat yang sejahtera. OPD sekarang menjadikan teknologi informasi sebagai pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi yang kuat dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat saat ini .

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun

kinerja individu yang bersangkutan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Razi, 2017). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Risky, dkk, 2019) yang mengatakan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Selain sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia juga menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan organisasi. kompetensi SDM atau *soft competence* atau *soft skill* (Sudarmanto, 2014) merupakan karakteristik sikap dan perilaku yang efektif yang akan menentukan kinerja unggul dalam pekerjaan. Menurut Lako dan Sumaryati (2002), Sumber daya manusia yang berkualitas paling tidak memiliki empat karakter berikut: 1). Memiliki *competence (knowledge, skill, abilities dan experience)* yang memadai, 2). Memiliki komitmen pada organisasi, 3). Selalu bertindak *cost – effectiveness* dalam setiap aktivitasnya, 4). *Congruence of goals* yaitu bertindak sesuai dengan tujuan organisasi.

Salah satu hambatan yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat adalah belum sesuai kualitas kerja aparatur dengan apa yang diinginkan masyarakat, kurang tersedianya sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan bidang kerjanya, kurang terampilnya aparatur pemerintah daerah dalam menangani tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, dan kondisi kapasitas administratif pegawai yang tidak memadai. Bagi instansi pemerintah, tersedianya SDM aparatur (Pegawai Negeri Sipil) yang berkualitas dan profesional merupakan suatu syarat dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan negara serta kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dibutuhkan tenaga SDM yang kompeten untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi pemerintah.

Kegiatan AKIP ini merupakan bentuk evaluasi yakni menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Evaluasi SAKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP. Selain itu mengacu pada Peraturan Menpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Banyuasin sudah menunjukkan hasil yang baik, tetapi belum optimal. Komponen yang dinilai di antaranya perencanaan kerja, pengukuran kinerja pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin masih belum optimal untuk meningkatkan kinerja Organisasi Pemerintah Daerah karena ada beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdampak adanya keterlambatan realisasi fisik dan keuangan triwulan ketiga sehingga belum mencapai 70% (<https://bappeda-litbang.banyuasin.kab.go.id/bupati-dan-wakil-bupati-banyuasin-monitoring-capaian-kinerja-opd/>). Untuk menyikapi hal ini, pemerintah mengambil inisiatif dan merubah pola monitoring evaluasi kinerja pembangunan.

Oleh karena itu dibutuhkan perbaikan sistem pengendalian intern untuk membantu instansi pemerintah dalam mengubah pola monitoring, serta dibutuhkan tenaga sumber daya manusia yang kompeten untuk dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dengan harapan agar tujuan perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuasin”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang di kemukakan di atas , maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh SPIP,

Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pemerintah kabupaten di kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Secara rinci rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
4. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (spip), pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Peneliti membatasi masalah penelitian hanya pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Banyuasin. Selain itu, penelitian ini dilakukan hanya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Banyuasin.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (spip), pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (spip), Pemanfaatan teknologi informasi, dan Kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat manfaat dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern (spip), pemanfaatan teknologi informasi, dan Kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut di harapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan dana desa agar lebih baik lagi kedepannya.